

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi dunia kini dihadapkan pada berbagai masalah kompleks yang melintasi batas-batas geografis, melibatkan banyak negara, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs NASA yang merupakan lembaga yang bertugas mengelola program ilmiah dan teknologi dalam bidang penerbangan dan eksplorasi antariksa situasi global semakin menunjukkan arah yang lebih negatif. Hal tersebut tercermin dari pengukuran yang dilakukan salah satunya karbon dioksida (CO_2). Berikut merupakan data yang tercatat oleh NASA:

Tabel 1. 1
Rata-Rata CO_2 Setiap tahun

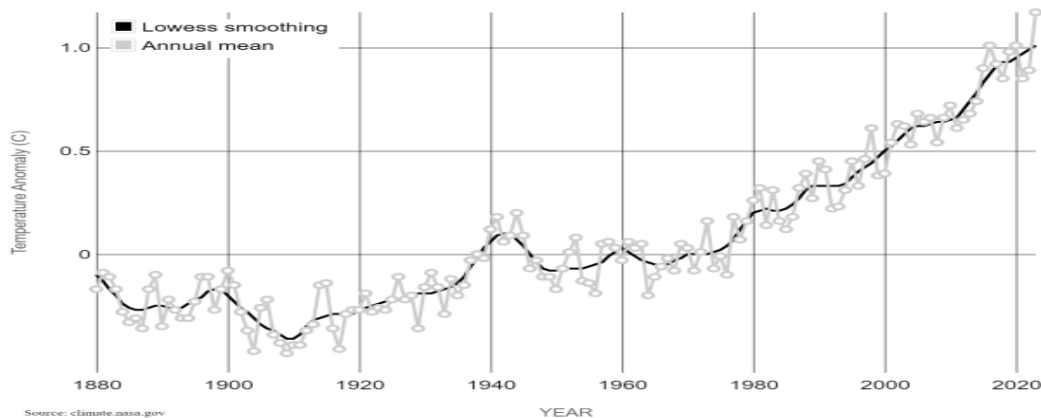
Tahun	CO_2 (<i>Part Per Million</i>)
2010	390.19 ppm
2015	401.42 ppm
2020	415.39 ppm
2023	420.75 ppm

Sumber : www.climate.nasa.gov (2024)

Tabel 1.1 mengungkapkan bahwa sejak abad ke-18 konsentrasi CO_2 di atmosfer meningkat akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Kenaikan ini memperburuk efek rumah kaca, mendorong pemanasan global, dan menyebabkan perubahan iklim yang berdampak luas, termasuk cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Data ini menunjukkan bahwa Bumi menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim buatan manusia.

Tidak hanya pengukuran pada karbon dioksida menurut data NASA pada tahun 2023 suhu permukaan rata-rata Bumi adalah yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1880. Bumi mengalami peningkatan suhu sekitar 2,45 derajat *fahrenheit* (sekitar 1,36 derajat *celcius*) pada tahun 2023

dibandingkan dengan rata-rata pra-industri pada akhir abad ke-19 (Tahun 1850-1900). Peningkatan suhu setiap tahun dapat tercermin pada gambar berikut :



Sumber : www.climate.nasa.gov (2024)

Gambar 1. 1
Grafik Peningkatan Suhu Setiap Tahun

Analisis oleh NASA ini pada umumnya sejalan dengan analisis independen dari organisasi seperti Administrasi Oseanik dan Atmosfer Nasional (NOAA). Indonesia sendiri berdasarkan data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada awal tahun 2024 hutan Indonesia berada dalam kondisi kritis karena tingkat deforestasi yang tinggi antara tahun 2017-2021 sekitar 2,54 juta hektar hutan hilang setiap tahun mendekati ambang krisis iklim. Situasi ini mencerminkan kerusakan pada hutan Indonesia di setiap wilayahnya. Sebagai contoh Kalimantan kehilangan sekitar 1,11 juta hektar hutan setiap tahunnya, diikuti oleh Papua dengan 556 ribu hektar per tahun, Sumatera 428 ribu hektar per tahun, Sulawesi 290 ribu hektar per tahun, Maluku 89 ribu hektar per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektar per tahun, dan Jawa 22 ribu hektar per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya tingkat deforestasi yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Salah satu penyebab utama degradasi lingkungan adalah aktivitas perusahaan terutama yang mengeksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku produksi (Wang & Azam, 2024). Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia juga mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Ayat 1, yang mewajibkan

perusahaan di sektor sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Wang & Azam, 2024).

Selain diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga perlu melaporkan praktik tersebut melalui laporan keberlanjutan. GRI (2021) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal dalam rangka mendukung kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, menurut Subagyo dan Murwaningsari (2023) laporan keberlanjutan merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerjanya terhadap tujuan pembangunan yang memperhatikan dampak jangka panjang dengan menitikberatkan pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan demi tercapainya manfaat yang berkelanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Laporan keberlanjutan adalah laporan terpisah yang lebih mendetail dan tidak terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (Zakia et al., 2023). Dalam hal ini, laporan keberlanjutan berbeda dari laporan keuangan yang hanya menyajikan informasi terkait kegiatan finansial perusahaan (Al Fatihah & Widiatmoko, 2022). Melalui laporan keberlanjutan kinerja perusahaan dapat langsung dievaluasi oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa, serta khususnya oleh investor dan kreditor hal ini karena mereka tidak ingin menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka (Aulia & Heryanto, 2022).

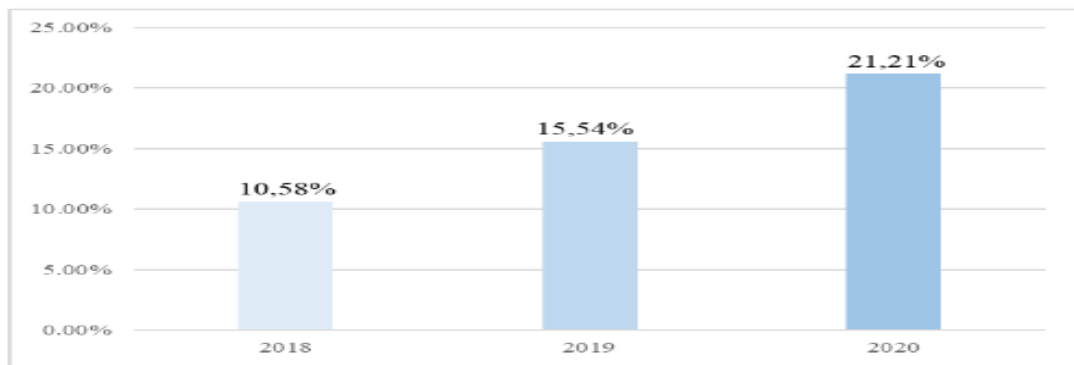
Laporan keberlanjutan dianggap penting karena melalui laporan ini perusahaan dapat lebih transparan dalam mengungkapkan potensi risiko dan peluang yang dihadapi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencapaian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan, serta mempermudah perbandingan perkembangan laporan keberlanjutan di Indonesia (Limarwati et al., 2024).

Secara internal laporan keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dampak operasional mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Limarwati et al., 2024). Ketika perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan standar yang berlaku perusahaan perlu mengumpulkan data lebih rinci mengenai operasionalnya termasuk dampak yang ditimbulkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan data yang terkumpul tersebut perusahaan dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan operasional dan mengurangi biaya sehingga dapat mencapai praktik yang lebih berkelanjutan, memperlancar proses, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi internal perusahaan (Limarwati et al., 2024).

Secara eksternal pelaporan keberlanjutan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (Limarwati et al., 2024). Perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan tidak hanya akan meningkatkan kinerja ekonominya tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya sebagai bentuk komitmen terhadap isu keberlanjutan yang dapat memberikan keyakinan kepada investor. Peningkatan kinerja di bidang lingkungan dan sosial akan memberikan dampak positif bagi keduanya. Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan termasuk dalam hal reputasi, kepercayaan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan (Agustina & Pradesa, 2024).

Meskipun sifatnya sukarela motivasi perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan umumnya berasal dari kesadaran internal perusahaan itu sendiri serta tekanan dari pemangku kepentingan karena pemangku kepentingan terutama investor dan kreditor tidak ingin menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hanan & Setiawan, 2023).

Berikut merupakan grafik tren global laporan keberlanjutan di Indonesia:



Sumber : Limarwati et. al., 2024

Gambar 1. 2
Tren Pelaporan Keberlanjutan Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.2 menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Limarwati et al. (2024) pada tahun 2018 terdapat 58 perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan yang setara dengan 10,58% dari total perusahaan. Angka ini meningkat menjadi 94 perusahaan atau 15,54% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 140 perusahaan atau 21,21% dari total perusahaan. Meskipun ada tren peningkatan dalam pelaporan keberlanjutan dari 2018 hingga 2020 persentase tersebut masih menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dibandingkan dengan total jumlah perusahaan (Limarwati et al., 2024).

Perusahaan mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dalam menyusun laporan keberlanjutan. GRI mewajibkan perusahaan untuk melaporkan visi dan strategi, profil, tata kelola, serta pendekatan manajemen mereka. *Sustainability Key Performance Indicator* (KPI) berfungsi sebagai salah satu set pedoman utama yang menyediakan cara yang tepat untuk melaporkan *triple bottom line* (Limarwati et al., 2024).

Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pengungkapan laporan keberlanjutan mengacu pada Standar GRI (Daromes et al., 2023). *Global Reporting Initiative* merupakan lembaga internasional independen yang membantu perusahaan dalam memahami dan menyampaikan laporan keberlanjutan kepada pemerintah serta para pemangku kepentingan (Maryana & Carolina, 2021). Sejak diterbitkannya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017

OJK juga meluncurkan panduan teknis pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi sektor perbankan pada akhir 2018 yang menandai dimulainya implementasi keuangan berkelanjutan per 1 Januari 2019, terutama bagi bank kategori BUKU IV dan bank asing. Selanjutnya, pada tahun 2021 OJK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16/SEOJK.04/2021 mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai panduan tambahan dalam penyusunan laporan keberlanjutan khususnya bagi sektor non-keuangan.

Pada tingkat internasional, dibentuklah *International Sustainability Standards Board* (ISSB), sebuah lembaga nirlaba yang bertugas mengembangkan serta mempromosikan standar akuntansi keberlanjutan (Kulik & Dobler, 2023). ISSB memusatkan perhatian pada penyusunan standar yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dengan tujuan utama menyediakan kerangka pelaporan yang komprehensif dan terstruktur bagi perusahaan dalam menyampaikan kinerja keberlanjutan mereka (De Villiers et al., 2024)

Untuk menghadapi tantangan ini ISSB telah merilis standar baru yang akan mengubah cara perusahaan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Salah satunya adalah penerapan awal standar internasional untuk Pelaporan Keuangan (IFRS) Keberlanjutan/S1 Pengungkapan Umum) yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan sumber daya. Selain itu, S2 (Pengungkapan terkait Iklim) yang telah digabungkan dengan Dewan Standar Pengungkapan Iklim (CDSB) dan Tim Kerja untuk Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang yang berhubungan dengan perubahan iklim (De Villiers et al., 2024).

Laporan keberlanjutan merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meski demikian, implementasi pelaporan ini di Indonesia masih belum optimal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan

bahwa kegiatan pembangunan di sektor energi mulai dari proses penyediaan hingga pemanfaatannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan fungsi lingkungan (Aulia & Heryanto, 2022).

Contohnya pada pertengahan tahun 2019 terjadi kebocoran pada salah satu pipa milik Pertamina di sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang menyebar hingga pesisir pantai di Karawang, Jawa Barat mencapai Kepulauan Seribu (CNBC Indonesia, 2019). Di tahun 2021 PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mencemari sungai dan pesisir pantai di Halmahera Timur yang mengancam ekosistem mangrove dan laut serta mengakibatkan warga kehilangan sumber air bersih (Mongabay, 2021). PT Aneka Tambang Tbk juga terlibat dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara (dpr.go.id, 2022). Banyaknya kasus yang terjadi mencerminkan bahwa perusahaan cenderung memprioritaskan peningkatan laba tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang berperan dalam memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Terdapat 148 item yang harus diungkapkan dalam pembuatan laporan keberlanjutan berdasarkan Standar GRI versi terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2021 serta dalam hal ini pengungkapan laporan keberlanjutan terbagi dalam 4 seri kategori utama yakni : Seri 100 mencakup tiga standar universal, Seri 200 Kinerja Ekonomi, Seri 300 Lingkungan, dan Seri 400 Sosial. Menurut SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berjudul pedoman teknis laporan keberlanjutan bagi emiten dan perusahaan publik. Isi laporan keberlanjutan menyatakan bahwa laporan keberlanjutan paling sedikit memuat 63 item atau 43% yang harus diungkapkan yang terdiri dari 7 kategori utama, yakni : Strategi keberlanjutan terdiri dari 1 item, ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan mencakup 10 item, profil perusahaan terdiri dari 9 item, penjelasan direksi mencakup 3 item, tata kelola keberlanjutan mencakup 5 item, kinerja keberlanjutan terdiri dari 30 item, dan lainnya mencakup 5 item (Maryana & Carolina, 2021).

Sesuai dengan prinsip GRI laporan keberlanjutan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan indeks pengungkapan laporan keberlanjutan (SRDi) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hanan & Setiawan (2023) SRDi merupakan indeks yang mengukur sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi standar GRI yang meliputi aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Adapun cara menghitung indeks SRDi yaitu skor item yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah item menurut Standar GRI yaitu 148 item dimana terdapat beberapa kriteria dalam penilaian tersebut jika perusahaan mengungkapkan elemen-elemen yang termasuk dalam Standar GRI maka akan diberikan nilai 1 dan jika tidak mengungkapkan akan diberi nilai 0 (Hanan & Setiawan, 2023).

Industri sektor energi termasuk salah satu sektor industri yang paling diawasi karena sektor energi sifatnya *high sensitivity* terhadap lingkungan dan sosial meskipun industri sektor energi menyumbang pendapatan yang besar bagi negara juga berpotensi merusak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasionalnya. Perusahaan di sektor energi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap lingkungan dan sosial meliputi masalah-masalah seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, serta dampaknya pada ekosistem dan keanekaragaman hayati, selain dampak sosial pada penduduk sekitar (Oladapo et al., 2025).

Berikut merupakan data pada perusahaan sektor energi mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan yang terjadi pada tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2
Indeks SRDI Pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2019-2023

NO	KODE EMITEN	INDEKS SRDI					RATA-RATA	KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	ABMM	58%	68%	93%	95%	95%	82%	M
2	ADRO	66%	65%	54%	58%	65%	62%	M
3	AIMS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
4	AKRA	40%	42%	68%	68%	64%	56%	M
5	APEX	0%	0%	25%	18%	18%	12%	TM
6	ARII	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
7	ARTI	14%	16%	18%	16%	16%	16%	TM
8	BBRM	0%	0%	0%	35%	35%	14%	TM

9	BIPI	35%	27%	27%	27%	27%	29%	TM
10	BSPLK	25%	28%	31%	21%	21%	25%	TM
11	BULL	20%	20%	22%	22%	22%	21%	TM
12	BUMI	58%	56%	66%	54%	54%	58%	M
13	BYAN	14%	20%	8%	21%	21%	17%	TM
14	CANI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
15	CNKO	10%	8%	20%	15%	15%	14%	TM
16	DEWA	54%	56%	54%	51%	51%	53%	M
17	DOID	45%	27%	39%	21%	21%	31%	TM
18	DSSA	14%	39%	25%	14%	14%	21%	TM
19	ELSA	43%	45%	39%	20%	20%	33%	TM
20	ENRG	35%	43%	45%	22%	22%	33%	TM
21	GEMS	15%	16%	31%	74%	74%	42%	TM
22	GTBO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
23	HITS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
24	HRUM	34%	16%	14%	18%	18%	20%	TM
25	IATA	11%	8%	14%	24%	24%	16%	TM
26	INDY	35%	37%	76%	76%	76%	60%	M
27	ITMA	65%	65%	65%	65%	65%	65%	M
28	ITMG	36%	59%	59%	59%	59%	54%	M
29	KKGI	29%	20%	20%	20%	20%	22%	TM
30	KOPI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
31	LEAD	36%	59%	59%	59%	59%	54%	M
32	MBAP	12%	12%	18%	17%	18%	15%	TM
33	MBSS	29%	27%	33%	33%	33%	31%	TM
34	MEDC	33%	33%	33%	35%	35%	34%	M
35	MTFN	8%	8%	13%	13%	13%	11%	TM
36	MYOH	19%	22%	22%	21%	21%	21%	TM
37	PGAS	70%	70%	81%	81%	81%	77%	M
38	PKPK	19%	22%	22%	22%	22%	21%	TM
39	PTBA	54%	72%	74%	74%	74%	70%	M
40	PTIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
41	PTRO	39%	68%	53%	68%	68%	59%	M
42	RAJA	24%	25%	28%	28%	28%	27%	TM
43	RIGS	0%	0%	0%	28%	28%	11%	TM
44	RUIS	0%	0%	0%	0%	25%	5%	TM
45	SMMT	33%	33%	33%	33%	30%	32%	TM

46	SMRU	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
47	SOCI	19%	24%	30%	30%	30%	27%	TM
48	SUGI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
49	TOBA	32%	35%	33%	39%	39%	36%	TM
50	TPMA	14%	14%	30%	30%	30%	24%	TM
51	TRAM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
52	WINS	31%	33%	33%	35%	35%	33%	TM
53	SHIP	18%	21%	25%	30%	30%	25%	TM
54	TAMU	15%	18%	12%	15%	15%	15%	TM
55	FIRE	18%	21%	25%	25%	25%	23%	TM
56	PSSI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
57	DWGL	0%	0%	8%	8%	8%	5%	TM
58	BOSS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
59	JSKY	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
60	INPS	0%	0%	0%	34%	34%	14%	TM
61	TCPI	27%	37%	37%	37%	37%	35%	TM
62	SURE	11%	16%	20%	22%	22%	18%	TM
63	WOWS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
64	TEBE	21%	25%	25%	35%	35%	28%	TM
65	BESS	32%	34%	35%	35%	35%	34%	TM
66	SGER	14%	14%	20%	25%	25%	20%	TM
67	UNIQ	12%	12%	16%	16%	16%	14%	TM
68	MCOL	14%	14%	14%	20%	20%	16%	TM
69	GTSI	0%	0%	44%	0%	0%	9%	TM
70	RMKE	0%	0%	34%	42%	43%	24%	TM
71	BSML	0%	0%	0%	24%	0%	5%	TM
72	ADMR	0%	0%	32%	39%	39%	22%	TM
73	SEMA	0%	0%	0%	24%	24%	10%	TM
74	SICO	0%	0%	14%	23%	23%	12%	TM
75	COAL	0%	0%	0%	20%	20%	8%	TM
76	SUNI	0%	0%	0%	9%	36%	9%	TM
77	CBRE	0%	0%	0%	10%	9%	4%	TM
78	HILL	0%	0%	0%	51%	43%	19%	TM
79	CUAN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
80	MAHA	0%	0%	0%	0%	23%	5%	TM
81	RMKO	0%	0%	0%	0%	11%	2%	TM
82	HUMI	0%	0%	0%	0%	33%	7%	TM

83	RGAS	0%	0%	0%	0%	11%	2%	TM
84	CGAS	0%	0%	0%	0%	62%	12%	TM
85	ALII	0%	0%	0%	0%	49%	10%	TM
86	MKAP	0%	0%	0%	0%	9%	2%	TM
87	ATLA	0%	0%	0%	0%	9%	2%	TM

Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2025)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase pengungkapan laporan keberlanjutan diperusahaan sektor energi dari 87 perusahaan terdapat 75 perusahaan yang belum mencapai standar minimal pengungkapan laporan keberlanjutan selama lima tahun berturut-turut yakni 43% berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik atau memiliki rata-rata 86% belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan. Ketika laporan keberlanjutan yang diungkapkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan perusahaan akan menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dari investor yang semakin mengutamakan keinginan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, perusahaan juga berisiko tidak dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko jangka panjang seperti dampak perubahan iklim, ketidakadilan sosial, atau krisis tata kelola yang pada akhirnya dapat mengancam hilangnya bisnis itu sendiri sehingga perusahaan tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal reputasi, tetapi juga potensi kerugian finansial dan hukum jika mereka gagal mematuhi regulasi yang semakin ketat (Gou & Li, 2025).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan di suatu perusahaan. Menurut Sari et al. (2021) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yuliandhari & Wulandari (2024) menganalisis pengaruh *corporate governance*, pertumbuhan perusahaan, dan paparan media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara itu, Subagyo & Murwaningsari (2023) meneliti pengaruh visibilitas

media dan digitalisasi bank terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan tata kelola sebagai variabel moderasi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya peneliti memilih beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, yaitu kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan visibilitas media.

Faktor pertama yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga dan menjadi bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (Sitanggang, 2021). Dalam Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional dengan persentase kepemilikan saham institusional.

Penelitian Madani & Gayatri (2021) menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alomran & Alsahali (2023) yang menyatakan bahwa pemilik saham institusional cenderung semakin menuntut informasi terkait laporan keberlanjutan dan mendorong perusahaan untuk membangun kredibilitas serta transparansi dalam laporan tersebut. Namun, penelitian Sidiq et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (IO) memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini juga didukung oleh Sari et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemegang saham institusional di Indonesia cenderung belum memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai faktor dalam berinvestasi. Oleh karena itu, para investor seringkali tidak menganggap pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Faktor kedua yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, serta pertumbuhan pendapatan yang tinggi akan lebih memilih mengalokasikan biayanya dalam pengungkapan laporan keberlanjutan dan akan menjadi salah satu pertimbangan para investor untuk mengalokasikan modalnya di perusahaan.

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan (Hasibuan et al., 2020). Perusahaan juga dapat menilai sejauh mana keberadaan perusahaan secara menyeluruh maupun di industri yang sama. Pada penelitian ini mengukur pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan pertumbuhan aset.

Penelitian Yuliandhari & Wulandari (2024) menyatakan pertumbuhan pada perusahaan mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan yang diukur menggunakan rasio pertumbuhan aset. Hal ini selaras dengan apa yang ditemukan oleh penelitian Carp et al. (2019) menyatakan bahwa Semakin tinggi rasio pertumbuhan suatu perusahaan maka semakin baik pula keadaan perusahaan tersebut dan mendukung dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitiannya Hasibuan et al. (2020) serta Yovana & Kadir (2020) menemukan hubungan negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan hal tersebut menunjukkan bahwa bisa jadi perusahaan dengan pendapatan tinggi lebih memilih menggunakan biaya-biaya untuk kegiatan produksi daripada menggunakan untuk kegiatan pengungkapan laporan keberlanjutan yang nantinya malah akan menambah biaya. Kebanyakan investor berorientasi pada kinerja jangka pendek dengan melihat keuntungan pada tahun berjalan, sedangkan laporan keberlanjutan dianggap berpengaruh pada kinerja jangka menengah dan jangka panjang sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor ketiga yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah Visibilitas media. Visibilitas media merupakan media transparansi informasi perusahaan dengan tujuan agar dikenal oleh publik dan berkomunikasi dengan investor (Subagyo & Murwaningsari, 2023). Dalam penelitian ini, variabel visibilitas media diukur dengan menggunakan rasio total biaya iklan dibagi total pendapatan.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa visibilitas media merupakan faktor penentu eksternal yang secara konsisten terbukti memiliki dampak positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang diukur menggunakan rasio total biaya iklan dibagi total pendapatan (Putu et al.,

2023). Hal ini selaras dengan penelitian Li et al. (2023) yang menyatakan bahwa visibilitas media meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan dan menunjukkan bahwa visibilitas media berdampak terhadap laporan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryana & Carolina (2021) dan Gonçalves & Gaio (2023) visibilitas media menunjukkan bahwa tidak berdampak terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Ketidakpastian lingkungan ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hubungan antara kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan visibilitas media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi potensi pengungkapan laporan keberlanjutan pada suatu perusahaan (Barker, 2025).

Ketidakpastian lingkungan adalah situasi yang kompleks dan tidak stabil di mana perusahaan atau individu harus menghadapi situasi di mana informasi yang tersedia terbatas, tidak lengkap, atau tidak dapat diprediksi dengan akurat (Rashidi et al., 2020). Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan menuntut organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal (Li et al., 2023). Ketidakpastian lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap penyusunan laporan keberlanjutan karena faktor eksternal yang tidak terduga seperti perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, dan isu sosial serta lingkungan yang terus berkembang dapat memengaruhi cara perusahaan merespon dan merencanakan strategi jangka panjang mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian cenderung lebih fokus pada pengelolaan risiko jangka panjang dan keberlanjutan sumber daya yang tercermin dalam kedalaman dan cakupan pengungkapan laporan keberlanjutan mereka. Ketidakpastian ini mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang yang dapat mempengaruhi kinerja keberlanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, perusahaan dalam kondisi ketidakpastian sering kali melengkapi laporan mereka dengan informasi mengenai skenario alternatif

atau kebijakan mitigasi risiko untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mereka akan beradaptasi terhadap perubahan yang tidak terduga. Sebaliknya, perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang lebih stabil mungkin tidak merasakan urgensi yang sama, sehingga laporan keberlanjutan yang dihasilkan lebih sederhana dan berfokus pada kinerja saat ini. Oleh karena itu, ketidakpastian lingkungan tidak hanya mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan responsif dalam menyusun laporan keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan dan akurat (Lee et al., 2020). Dalam penelitian ini, variabel ketidakpastian lingkungan diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan.

Penelitian Tang & Chen (2020) mengungkapkan bahwa persaingan pasar memengaruhi tata kelola perusahaan yang baik yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan ketika ketidakpastian lingkungan meningkat keleluasaan manajemen dalam pengambilan keputusan juga meningkat sering kali mengabaikan aktivitas keberlanjutan yang dianggap menambah biaya. Sementara penelitiannya Rashidi et al. (2020) memberikan bukti empiris bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki efek negatif terhadap kinerja lingkungan, kondisi ini memerlukan pengawasan yang kuat dari pemegang saham untuk memastikan bahwa manajemen tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi demi kepentingan jangka panjang jika fungsi pengawasan lemah, manajemen cenderung mengabaikan penyusunan pelaporan keberlanjutan yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, dan saat ini laporan keberlanjutan menjadi hal krusial karena adanya tekanan yang mengharuskan perusahaan untuk bisa lebih *aware* dan peduli terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, dan Visibilitas Media Terhadap Pengungkapan Laporan keberlanjutan Dengan Ketidakpastian lingkungan Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
2. Apakah pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
3. Apakah pengaruh visibilitas media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
4. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
6. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh visibilitas media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menghasilkan suatu bukti serta fakta empiris mengenai :

1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. Visibilitas media berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
4. Ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
5. Ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
6. Ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh visibilitas media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dalam dua sudut pandang, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan visibilitas media terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perusahaan dalam melakukan keputusan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan yang disajikan oleh perusahaan dan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan faktor-faktor baru yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.